

Laporan Pemantauan Konflik di Aceh

1 – 30 April 2007



Bank Dunia /DSF

Pada bulan April terdapat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam insiden kekerasan berat.¹ Beberapa insiden pelemparan granat misterius telah mengantar Aceh ke tingkat kekerasan politik yang baru, dengan rumah dan kantor dinas pemimpin pemerintah yang menjadi sasaran. Meski tidak ada korban luka, insiden seperti ini sangat beresiko mengakibatkan korban jiwa dan dapat memicu siklus kekerasan atas dasar balas dendam. Ada beberapa kemungkinan mengapa serangan-serangan ini terjadi tetapi perebutan sumber daya, termasuk hak untuk melakukan pemerasan dan akses terhadap proyek rekonstruksi dan dana reintegrasi, adalah salah satu faktor penting. Beberapa insiden kekerasan lain yang terjadi bulan ini membuktikan berlanjutnya perpecahan paska konflik seperti yang kami soroti di edisi sebelumnya. Lagi, kekerasan mencapai tingkat tertinggi paska MoU bulan ini dengan 23 insiden. Disamping penyerangan granat, ada beberapa pengeroyokan terhadap pencuri, penyerangan balas dendam, dan kerusakan. Meningkatnya kekerasan ini belum mengancam proses perdamaian maupun upaya rekonstruksi. Meskipun demikian, hal ini menunjukkan bahwa kemajuan yang terjadi sejak adanya MoU Helsinki tidak boleh disiasikan, dan usaha harus terus menerus dilakukan untuk memperkuat perdamaian di Aceh yang berkelanjutan. Program bantuan memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini, tetapi sebaliknya bantuan rekonstruksi dan reintegrasi dapat juga menyebabkan masalah-masalah. Laporan Pemantauan ini juga meninjau konflik yang terjadi baru-baru ini sehubungan dengan kinerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR).

Kekerasan politik melonjak dengan peristiwa pelemparan granat

Serangkaian peristiwa pelemparan granat terjadi pada bulan April (lihat Kotak 1). Penyerangan tersebut sepertinya lebih bertujuan untuk mengintimidasi daripada untuk membunuh, karena granat dilempar ke gedung dan bukannya ke arah orang-orang, serta tidak ada korban luka-luka. Meskipun demikian, penyerangan-penyerangan ini merupakan peningkatan dalam kekerasan politik di Aceh. Karena tidak ada satupun kasus diatas yang terpecahkan, baik pelaku maupun motif penyerangan masih belum diketahui. Secara khusus kami belum bisa mengkategorikan insiden ini sebagai insiden antara GAM/RI, maka angka kami masih tetap tidak menunjukkan adanya insiden GAM/RI (lihat Figur 1).²

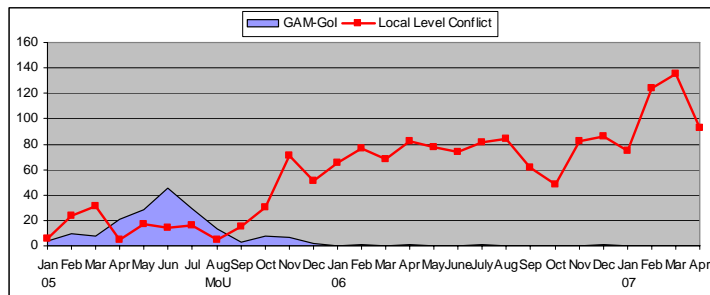
¹ Sebagai bagian dari program dukungan analisis bagi proses perdamaian, Program Konflik dan Pengembangan di Bank Dunia Jakarta menggunakan metodologi pemetaan konflik melalui surat kabar untuk merekam dan mengkategorikan semua laporan tentang insiden konflik di Aceh yang diberitakan di dua surat kabar daerah (Serambi dan Aceh Kita). Program ini mempublikasikan perkembangan per bulan, sejauh mungkin didukung oleh kunjungan ke lapangan, yang terangkum dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Laporan Pemantauan bulanan dapat diakses melalui: www.conflictanddevelopment.org. Dataset tersedia bagi yang membutuhkan, dengan menghubungi Blair Palmer di: bpalmer@worldbank.org. Terdapat keterbatasan dalam menggunakan surat kabar untuk memetakan konflik, lihat: Patrick Barron dan Joanne Sharpe (2005). "Counting Conflict: Using Newspaper Reports to Understand Violence in Indonesia", *Indonesian Social Development Paper No. 7*. Jakarta: World Bank.

²Insiden GAM-RI' adalah insiden dimana kedua belah pihak terlibat dalam insiden kekerasan ketika mereka berperan sebagai angkatan bersenjata. Dengan adanya mantan GAM yang terpilih menjadi pemimpin pemerintahan di tingkat propinsi dan di beberapa kabupaten, terdapat ambiguitas dalam pengkategorian "konflik GAM/RI".

Kotak 1: Insiden Granat pada bulan April

- *Kantor Bupati Aceh Utara dan Lhokseumawe, 3 April.* Sebuah kotak yang berisi granat aktif ditemukan diluar kantor Bupati Aceh Utara. Di dalamnya terdapat sebuah surat berbahasa Aceh yang berisi ancaman bila Bupati terus “melanggar dalam bertugas”. Sebuah kotak lain ditemukan di depan kantor Walikota Lhokseumawe, berisi empat peluru, kain kafan, dan surat yang berisi ancaman bila Walikota tidak melaksanakan program yang dijanjikan pada kampanye pilkada.
- *Rumah Wakil Walikota Lhokseumawe, 23 April.* Pada pukul 19.45 sebuah granat dilemparkan ke rumah Wawali (yang juga seorang mantan anggota GAM), dan menyebabkan kerusakan di bangunan rumah. Wawali sedang di luar kota.
- *Mabes Brimob, Banda Aceh, 24 April.* Beberapa saat setelah jam 12 malam, sebuah granat dilemparkan ke Mabes Brimob. Tiga kendaraan rusak. Penyerang dikira mengendarai sepeda motor sambil melempar granat.
- *Rumah Sofyan Dawood, Lhokseumawe, 29 April.* Sebuah granat dilemparkan ke rumah Juru Bicara KPA pada tengah malam, yang meledak 1,5 meter dari rumahnya dan menyebabkan kerusakan kecil. Sofyan sedang berada di Jakarta, tetapi Ibu, istri, dan orang lain sedang berada di rumah. Istrinya mengatakan bahwa ada orang-orang datang ke rumahnya untuk meneror, tiga kali dalam tiga bulan terakhir ini.

Figur 1: Konflik GAM-RI dan tingkat lokal per bulan



Lokasinya, waktunya, dan sasaran dari penyerangan-penyerangan ini mengindikasikan bahwa ada hubungan antara beberapa di antaranya. Tiga penyerangan menargetkan orang-orang elit KPA sebagai sasaran, beberapa diantaranya memimpin di Aceh Utara dan Lhokseumawe. Sebuah peringatan pada tanggal 3 April disusul dengan peledakan pada tanggal 23 April, mengindikasikan bahwa peringatan pertama tidak ditanggapi seperti yang diharapkan. Terjadinya pelemparan granat di Brimob lima jam setelah terjadi pelemparan granat di rumah Wakil Walikota juga menunjukkan kemungkinan ada kaitan, meskipun bisa juga penyerangan di Brimob merupakan tiruan atas penyerangan di rumah Wawali.

Analisa surat kabar dan wawancara kami mengindikasikan beberapa teori tentang siapa yang ada dibalik penyerangan dan motif mereka. Antara lain penyerangan bisa jadi:

- ***Tindakan provokatif untuk merusak perdamaian di Aceh***

Tak lama setelah terjadi salah satu insiden, seorang pejabat menyatakan bahwa penyerangan tersebut bisa jadi dilakukan oleh “kelompok yang tidak ingin perdamaian di Aceh”. Tentu memang ada beberapa kelompok yang diuntungkan oleh adanya konflik daripada perdamaian, dan beberapa diantara pihak tersebut mempunyai kemampuan untuk melakukan penyerangan seperti yang telah terjadi di atas.³ Namun dilihat dari sasaran penyerangan itu mengindikasikan bahwa ada tujuan ekonomi atau politik yang khusus, bukan hanya untuk merusak stabilitas Aceh.

- ***Tindakan balas dendam oleh aktor bersenjata (TNI dan/atau mantan GAM)***

Kemungkinan kedua adalah bahwa penyerangan ini adalah sebagai aksi balas dendam atas kejadian-kejadian masa lalu yang dilakukan oleh kelompok sasaran. Sebagai contoh, berkenaan dengan pelemparan granat di Brimob, kami menerima laporan yang belum dikonfirmasi bahwa

³ Untuk skenario yang demikian, satuan keamanan yang menjadi perkiraan utama. Meski demikian, ada beberapa fraksi dalam tubuh KPA yang memiliki komitmen rendah dengan MoU. Bupati Aceh Utara Ilyas A. Hamid, yang mendapat kiriman granat di kantornya pada tanggal 3 April, mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok baik di dalam maupun di luar Aceh yang tidak menginginkan adanya perdamaian di Aceh – tidak tertutup kemungkinan ini mengarah pada fraksi-fraksi di tubuh KPA/GAM itu.

seorang anggota TNI dipukuli oleh anggota Brimob (karena memperebutkan perempuan) sebelum terjadinya pelemparan granat.⁴ Pada bulan Maret, terdapat beberapa insiden di Aceh Utara (seperti di Nisam dan Sawang) dimana ada anggota militer atau polisi yang dipukuli oleh masyarakat. Insiden-insiden ini mungkin menimbulkan keinginan balas dendam oleh kelompok yang tersakiti terhadap pemimpin pemerintah dan/atau pemimpin KPA yang turut campur untuk menyelesaikan masalah tersebut.

• ***Peringatan/pesan politik terkait perebutan sumber daya atau peluang ekonomi***

Kemungkinan ketiga, dan mungkin yang paling mendekati sebenarnya, adalah bahwa pelemparan granat tersebut merupakan lebih dari hanya sekedar aksi balas dendam – bahwa pelemparan itu adalah bentuk peringatan yang disampaikan untuk mendapatkan tanggapan tertentu dari sasaran. Hal ini sesuai dengan sifat penyerangan tersebut, yang hanya menyebabkan kerusakan material dimana korban jiwa bisa dengan mudah didapatkan. Perebutan kekuasaan saat ini terjadi di banyak tempat di Aceh, yang sedang berada dalam masa transisi politik; yang menjadi taruhan adalah akses terhadap sumber daya, seperti kontrak bangunan, akses terhadap dana reintegrasi⁵, dan hak untuk memeras uang dari pelaksana proyek. Pajak Nanggroe sudah lama menjadi kebiasaan di Aceh, terutama di daerah seperti Aceh Utara dan Lhokseumawe yang berada di bawah kekuasaan GAM sebelum MoU. Usaha untuk menghentikan praktek ini belum berhasil secara tuntas (lihat Kotak 2). Banyak donor dan kontraktor yang mengeluh adanya percobaan pemerasan oleh mantan kombatan GAM (dan orang lain). Bupati Aceh Utara selama ini dikenal tegas melarang pemerasan, dan kemungkinan ini sudah membuatnya dianggap musuh oleh pihak-pihak tertentu.⁶

Kotak 2: Mengurangi pemerasan dan kolusi pada proses tender

Bagaimana Pemerintah dan pemimpin KPA menangani pemerasan dan kolusi akan menjadi sangat vital baik untuk menjaga perdamaian jangka pendek dan untuk menegakkan *good governance*. Yang diperlukan adalah pelaksanaan hukum yang tegas dan adil, kerjasama yang strategis dan efektif dengan KPA dan kelompok-kelompok lain, serta program mata pencaharian untuk menyediakan alternatif. Donor dapat membantu dalam semua hal ini. Agar dapat mencegah percobaan pemerasan pada proyek-proyek rekonstruksi, donor seharusnya berbagi informasi mengenai masalahnya, dan bekerjasama untuk merencanakan dan melaksanakan solusi, termasuk advokasi bersama. Untuk pemerintah, pemerasan terhadap proyek dan kolusi dalam proses tender tidak akan dapat dicegah tanpa perjuangan. Intervensi serupa juga akan dibutuhkan untuk membatasi profit terlarang yang didapat dari industri-industri selain rekonstruksi. Konflik kekerasan mungkin akan muncul bila Gubernur Irwandi berhasil dalam usahanya untuk melaksanakan penanggulangan logging di Aceh. Strategi manajemen konflik akan sangat dibutuhkan.

Belum diketahui siapa di balik penyerangan-penyerangan ini, dan mungkin ada penyebab yang berbeda-beda. Meski demikian, dengan adanya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, banyaknya sumber daya dalam bentuk proyek dan sumber daya alam, pergeseran mendadak pada kekuatan politik, serta sisa senjata yang masih beredar di Aceh, sangat mungkin terjadi kekerasan dalam perebutan sumber daya, walaupun gejalanya bisa jadi sulit

⁴ Perlu dicatat, insiden ini tidak dilaporkan di surat kabar tingkat propinsi. Juga perlu dicatat bahwa penyerangan bersenjata antara berbagai elemen TNI dan Polri sudah sering terjadi di Indonesia.

⁵ Kelompok-kelompok yang sakit hati karena tidak menerima bagian dana reintegrasi mungkin termasuk elemen KPA dan organisasi anti separatist, begitu juga GAM yang menyerah.

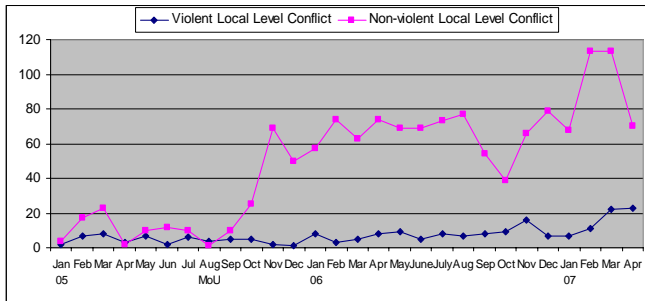
⁶ Meskipun banyak LSM menghadapi percobaan pemerasan, satu LSM internasional yang bekerja di Aceh Utara pernah menghadapi permintaan uang dalam jumlah besar. Dengan bantuan anggota KPA senior di Banda Aceh, pemerasan dapat dihentikan; Bupati Aceh Utara juga membuat pernyataan keras melawan pemerasan sekitar waktu itu. Peristiwa ini terjadi beberapa minggu sebelum terjadi insiden granat yang pertama di Aceh Utara.

diidentifikasi. Angka kriminalitas yang tinggi (seperti yang terjadi di Aceh Timur) mungkin merupakan indikasi lain bahwa terdapat kelompok-kelompok yang merasa dianaktirikan dari peluang-peluang ekonomi.

Lagi, kekerasan mencapai angka tertinggi, meski konflik non kekerasan menurun

Rekor angka tertinggi konflik kekerasan bulan lalu terpatahkan dengan angka tertinggi yang dicapai bulan ini, dengan 23 kasus yang tercatat (lihat Figur 2).⁷ Tingginya tingkat kekerasan bulan ini dikarenakan oleh insiden granat serta tingginya angka pengeroyokan terhadap maling dan penyerangan balas dendam (lihat Tabel 1 untuk ringkasan bentuk-bentuk kekerasan bulan ini). Bulan ini terjadi tujuh pengeroyokan terhadap maling, salah satunya berakhir dengan kematian. Pada kasus pengeroyokan bulan-bulan lalu, sasaran pengeroyokan yang dilaporkan lebih cenderung menjadi orang yang ditangkap karena *khalwat* daripada terhadap pencuri, dan lebih cenderung non-fatal. Tujuh penyerangan balas dendam bulan ini terjadi dalam berbagai bentuk – lihat Kotak 3.

Figur 2: Konflik kekerasan dan non kekerasan per bulan



Tabel 1: Jenis konflik kekerasan lokal bulan April

#	Jenis insiden kekerasan
7	<i>Pengeroyokan</i> terhadap maling. Satu berakhir fatal.
7	<i>Penyerangan balas dendam</i> , termasuk empat pembunuhan, satu penculikan, satu pengeroyokan, dan satu kelompok menyerang dengan parang
4	<i>Kekerasan politik</i> , termasuk tiga penyerangan granat, dan satu percobaan pembakaran
2	<i>Kerusuhan</i> , keduanya terjadi pada pertandingan sepak bola.
3	<i>Kasus lain</i> , termasuk pemukulan karena <i>khalwat</i> , perampokan terhadap istri ketua KPA dan pemukulan terhadap anggota KPA oleh TNI (keduanya dijelaskan dibawah)

Pengeroyokan terhadap maling mengindikasikan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta banyaknya orang-orang yang terhimpit sampai bersedia mencuri.

Penyerangan balas dendam mengindikasikan kurangnya metode penyelesaian konflik yang lain, serta tingginya tingkat frustrasi pada masyarakat Aceh. Perkelahian karena memperebutkan buah duku dan pasir mengingatkan bahwa sumber daya seringkali diklaim oleh

Kotak 3: Penyerangan balas dendam pada bulan April

- Pada tanggal 8 April, seorang pemuda ditemukan tewas di Muara Satu, Lhokseumawe. Meski kasusnya tidak terselesaikan, beberapa temuan menunjukkan adanya persoalan keluarga
- Pada tanggal 9 April, sekelompok laki-laki dengan parang menyerbu pasar di Canda Muara Dua, Lhokseumawe, melukai dua orang. Penyerangan tersebut adalah pembalasan atas perselisihan yang terjadi sebelumnya antara penjual buah duku.
- Pada tanggal 16 April, seorang laki-laki di Banda Aceh terbunuh di rumahnya oleh pembantunya, yang marah karena majikannya tidak mau menikahinya. Mereka dikabarkan menjalin hubungan.
- Pada tanggal 19 April, seorang laki-laki terbunuh di Seulimum, Aceh Besar. Polisi melaporkan bahwa pembunuh adalah teman si korban, tapi mereka berselisih atas akses ke sumber pasir dan batu untuk rekonstruksi.
- Pada tanggal 13 April di Aceh Singkil, mayat dari seorang penjual karet ditemukan, terapung di perahunya. Dua hari kemudian seorang tersangka ditangkap dan mengaku membunuh karena balas dendam, karena katanya korban telah memperkosa istri tersangka tahun lalu.
- Pada 5 April terjadi penculikan di Langsa - dijelaskan di bawah
- Pada 18 April terjadi pemukulan oleh anggota KPA di Pidie - dijelaskan di bawah.

⁷ Sebelumnya, kami klasifikasi sweeping dan penangkapan oleh warga sebagai kekerasan, meskipun korbannya tidak dipukuli, karena pelaku tidak memiliki wewenang untuk menerobos masuk ke rumah orang dan melakukan penangkapan. Sekarang, kami telah klasifikasi ulang insiden tersebut sebagai non-kekerasan, supaya definisi ‘kekerasan’ menunjuk kasus-kasus kekerasan fisik terhadap manusia ataupun gedung (tetapi termasuk penculikan). Figur 2 telah direvisi untuk mencerminkan definisi ini.

pihak yang kuat dan dilindungi melalui kekerasan.

Penyerangan balas dendam tersisa dari jaman pra-MoU, seperti yang terjadi di Langsa, mengindikasikan perlunya upaya Kebenaran dan Rekonsiliasi segera dimulai, seperti yang sudah ditetapkan dalam MoU.

Insiden kekerasan terus mencerminkan perpecahan masyarakat

Insiden kekerasan terus mencerminkan perpecahan pada masyarakat Aceh, seperti yang antara satuan keamanan dan masyarakat, atau antara satuan keamanan dan GAM/KPA.⁸ Bulan ini terdapat tujuh insiden yang mencerminkan perpecahan konflik masa lalu, yang juga punya potensi untuk memperkuat perpecahan tersebut.

KPA vs. TNI

- Tanggal 22 April di Pante Bidari, Aceh Timur. Sekelompok 10 orang yang melewati posko TNI yang menjaga sumur minyak Exxon Mobile dipukuli. Salah satu korban mengatakan bahwa ia telah memperkenalkan diri sebagai anggota KPA kepada posko TNI sebelum memasuki dan menebang pohon dengan sensaw. Kayu tersebut dimaksudkan untuk membangun rumahnya yang terbakar sewaktu konflik. Dalam perjalanan keluar dengan kayu, ia dan teman-temannya dihadang dan dipukuli oleh anggota TNI.

KPA vs. Masyarakat

- Pada tanggal 18 April di Muara Tiga, Pidie, seorang pengemudi truk dipukuli oleh puluhan orang, karena perkelahian terkait lalu lintas yang terjadi sebelumnya. Penyerang disebut sebagai anggota KPA oleh korban. Pada tanggal 19 April, polisi menggeledah kantor KPA di Sigli dan menangkap delapan tersangka serta menemukan beberapa senjata. Pada tanggal 27 April, sebuah pertemuan diadakan antara Bupati Mirza Ismail, KPA, dan polisi, dengan bantuan dari Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK), mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan hukum adat.

Satuan Keamanan vs. Masyarakat

- Pada tanggal 31 Maret di Banda Aceh, seorang perempuan ditembak tiga kali dan sepeda motornya dicuri. Tersangka utama adalah saudara iparnya, seorang tentara TNI. Dia ditangkap pada tanggal 26 April setelah desersi dari unitnya. Sepertinya ia mengira ia menembak istrinya. Meski bukan akibat dari perpecahan TNI vs. masyarakat, insiden ini bisa memperparah perpecahan itu.⁹

Kelompok Anti Separatis vs. Masyarakat

- Tanggal 18 April di Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Serambi melaporkan bahwa orang-orang yang mengaku dirinya anggota PETA meminta uang dari masyarakat dengan berdalih akan membuka rekening bank untuk menerima dana reintegrasi. Dilaporkan juga bahwa pendistribusian dana reintegrasi untuk PETA di Aceh Tamiang sedang diselidiki oleh polisi. Sebuah penyelidikan menunjukkan bahwa dari distribusi tahap pertama sebesar Rp. 450 juta, 75% tidak sampai ke tujuan yang benar.

⁸ Laporan Pemantauan baru-baru ini juga mencakup penyerangan pada tanggal 2 Februari terhadap kantor Forkab di Bireuen, dan penyerangan pada tanggal 27 Maret terhadap kantor KPA di Lhoksukon, Aceh Utara. Laporan-laporan tersebut tersedia di www.conflictanddevelopment.org.

⁹ Insiden ini terjadi pada bulan Maret tapi dilaporkan pada bulan April, maka kami menyebutnya disini.

Ketegangan antar masyarakat mengenai keberpihakan GAM/RI

- Enam pemuda menculik seorang perempuan di Langsa pada tanggal 5 April. Ia ditahan semalam, “diinterogasi”, dan diperlakukan secara kasar. Korban melapor ke polisi, yang kemudian menangkap enam pemuda itu. Korban mengaku bahwa pemuda-pemuda itu menuduhnya sebagai mata-mata sewaktu konflik.

Lainnya¹⁰

- Tanggal 24 April di Ranto Peureulak, Aceh Timur. Istri ketua KPA setempat Nurul Akla dirampok di rumahnya. Dua orang laki-laki mematikan aliran listrik ke rumahnya, mengancam dengan pistol, merampok, dan memukulinya. Meski ini bisa jadi kriminalitas bukan konflik, metode dan sasarannya mengindikasikan bahwa perpecahan sosial mungkin menjadi salah satu faktor dalam insidennya.
- Pada tanggal 23 April di Redelong, Bener Meriah. Kelompok tak dikenal berusaha membakar kantor KPA di Linge (untuk Aceh Tengah/Bener Meriah) pada pukul 2 pagi. Seseorang terlihat pergi meninggalkan lokasi dan memasuki sebuah mobil. Satu sepeda motor hancur dalam kebakaran itu, tetapi gedungnya berhasil diselamatkan.

Agar bisa menghadapi perpecahan-perpecahan ini, dan potensinya menyebabkan konflik lagi, perlu diambil beberapa tindakan. Kepercayaan harus dibangun antar kelompok-kelompok ini. Proyek bersama dan forum untuk diskusikan dan meredakan konflik sebelum meluas akan sangat membantu. Pemimpin kelompok-kelompok ini (termasuk TNI, polisi, kelompok anti-separatis, dan KPA) juga harus dilibatkan, agar membantu mereka menjaga ketertiban dan profesionalisme di jajaran mereka.

Kepergiannya AMM pada bulan Desember 2006 meninggalkan suatu kekosongan; tidak ada forum non-partisan untuk menyelesaikan konflik di tahap-tahap awal. Sebuah badan baru, Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) untuk Aceh Damai didirikan pada tanggal 18 April di bawah Aceh Desk di pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk memantau dan mendukung proses perdamaian, termasuk menanggapi masalah-masalah khusus yang muncul untuk kemudian memberi rekomendasi kepada Gubernur. Forum ini diketuai oleh mantan deputy perwakilan RI untuk AMM, Brigjen Amiruddin Usman, dan 18 anggotanya berasal dari pemerintahan (tingkat nasional dan propinsi) disertai tiga anggota dari KPA (Muzakir Manaf, Irwansyah, dan Zulkifli Amin). Insiden-insiden granat barangkali merupakan tantangan awal yang harus mereka hadapi.

Konflik terkait bantuan terus terjadi; banyak terkait ketidakpuasan terhadap kinerja BRR

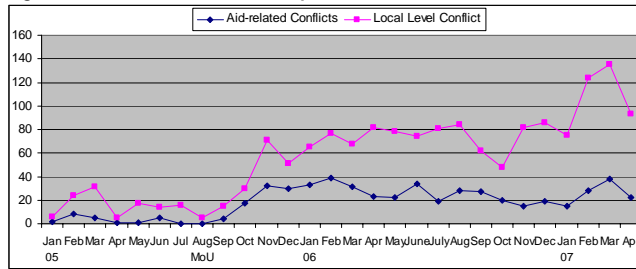
Bulan ini tercatat 22 konflik lokal terkait program bantuan (lihat Figur 3). Ketidakpuasan atas kinerja BRR, dan khususnya dengan kualitas bangunan yang dibuat oleh kontraktor mereka adalah subyek beberapa konflik bulan ini. Terdapat 13 konflik yang terkait dengan kinerja BRR (lihat Tabel 2).

Dua demonstrasi melawan BRR terjadi bulan ini. Pada tanggal 9 April, ratusan pengungsi dipimpin oleh Forak (Forum Antar Barak) berdemonstrasi di BRR, meminta supaya rumah dibangun secepatnya dan juga meminta bantuan modal untuk usaha kecil, beasiswa, dan fasilitas kesehatan. Hari berikutnya demonstrasi berlanjut dengan mosi tidak percaya terhadap BRR, yang ditanda tangani dengan darah oleh Panji Utomo, pemimpin Forak. Demonstrasi kedua terjadi pada tanggal 19 April di gedung DPRD di Banda Aceh oleh Alee (Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Aceh), menuntut agar BRR di-audit oleh auditor internasional. Mereka menuduh satuan anti korupsi BRR sebagai bias dan kurang aktif, karena kasus-kasusnya diproses hanya

¹⁰ Karena pelaku kasus ini tidak diketahui, sulit untuk mengklasifikasi kasusnya.

kalau ada tekanan kuat dari LSM dan masyarakat. Menurut Serambi, anggota DPR yang bernama Mukhlis Mukhtar mengatakan pada demonstran bahwa audit seperti yang diminta akan dilaksanakan.

Figur 3: Konflik terkait bantuan per bulan



Hanya satu dari 13 konflik ini yang berakhir dengan kekerasan. Walau begitu, demonstrasi melawan BRR pernah berakhir dengan kekerasan di masa lalu, dan berlimpahnya korban tsunami yang tidak puas dengan rumah bantuan mereka, atau frustrasi karena belum dapat rumah bantuan, membuat situasi cukup tegang. Hal ini bisa ditanggapi dengan memperbaiki pemantauan proyek-proyek yang selesai, menyebarluaskan jadwal pelaksanaan, dan memastikan pelaksanaan diselesaikan sesuai tenggat waktu.

Tabel 2: Jenis konflik terkait BRR bulan April

#	Gambaran insiden
7	Penerima bantuan atau LSM protes atas rumah atau bangunan lain (irigasi, sekolah, drainase) yang tidak diselesaikan dengan baik
2	Demonstrasi melawan BRR
2	Rapat yang terjadi keributan (satu berakhir dengan kekerasan)
1	Tim verifikasi BRR menyegel beberapa rumah bantuan di Banda Aceh karena pemilik dapat rumah bantuan ganda
1	Seorang yang mengaku sebagai orang tinggi KPA datang ke BRR, marah-marah dan meminta diberikan kontrak. Dia kemudian ditangkap KPA dan diserahkan ke polisi.

Meskipun kebanyakan dari konflik-konflik ini terkait ketidakpuasan atas hasil proyek BRR, beberapa diantaranya adalah hasil dari usaha pemantauan BRR, atau hasil dari usaha orang untuk menuntut proyek secara paksa. Pekerjaan “tim verifikasi” seperti yang disebutkan di Tabel 2 baru saja mulai. Setelah BRR mengeluarkan surat yang meminta warga melaporkan adanya kepemilikan rumah ganda, Serambi melaporkan bahwa BRR menerima 200 laporan dari Aceh Besar dan 175 dari Banda Aceh. Berarti mereka memiliki banyak sekali tugas verifikasi yang harus dikerjakan, dan potensi konflik harus terus dihadapi.

Banyaknya persengketaan atas rumah-rumah bantuan tampaknya terkait dengan kurangnya kualitas pada pekerjaan kontraktor. Hal ini menunjukkan bahwa BRR dalam banyak kasus gagal memastikan kontraktor melakukan tugas mereka sesuai kontrak; masyarakat mengeluh rumah mereka tidak ada lantainya, tanpa listrik, tanpa atap, atau kondisinya yang masih setengah-setengah setahun setelah kontrak ditandatangani.

Proses tender sendiri juga disebut bermasalah. Sudah ada beberapa permintaan kepada BRR untuk lebih rajin mencoret (*blacklist*) kontraktor-kontraktor yang gagal memenuhi kontraknya.¹¹ Ada kecurigaan bahwa beberapa pemenang tender kemudian mengkontrakkan proyeknya kembali (sub-kontrak) dengan nilai jauh di bawah. Praktek ini bisa berujung pada bangunan yang bermutu rendah karena kurang biaya. Namun hal ini akan dimungkinkan hanya dengan supervisi yang kurang dan kalau pembayaran terakhir dilakukan tanpa inspeksi.

Tuntutan agresif agar diberi kontrak rekonstruksi terus-menerus menjadi masalah. Sofyan Dawood pada tanggal 15 April memohon agar segala upaya begitu harus dilaporkan pada KPA dan polisi. Pelemparan granat di rumahnya terjadi tidak lama setelah ia menyampaikan hal itu.

¹¹ Bupati Aceh Jaya pada tanggal 1 Mei meminta agar polisi menangkap kontraktor yang tidak selesaikan pembangunan rumah di desa Keutapang dan di Calang. Tim DPRD Nagan Raya merekomendasi rumah BRR di Suak Puntong dibangun kembali, setelah masyarakat mengeluh tentang kualitas rumah. Tim merekomendasi agar kontraktor didaftarhitamkan (*blacklisted*), dan agar BRR meingkatkan monitoringnya.